

PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI TAMAN WISATA ALAM LAUT PULAU MARSEGUKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU

*The Development Of Community-Based Marine Ecotourism And The Role Of
Stakeholder In Natural Resource Management In Marsegu Island Nature
Tourism Park, West Seram District, Maluku Province*

Henderina Lelloitery¹, Satyawan Pujiatmoko¹, Chafid Fandelli¹, dan M.Baiquni²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

²Jurusan Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Abstract. The research objective was to determine the development of marine ecotourism based on community participation and stakeholder involvement. The research method used is a survey method by observing and inventorying the forms of community involvement by means of interviews and Focus Group Discussion (FGD). Data were analyzed qualitatively qualitative. The results showed that the potential of marine ecotourism in Marsegu Island Nature Tourism Park (NTP) was very diverse, especially in coastal and aquatic ecosystems including mangrove forest ecosystem in the bay of Pelita Jaya and Kotania and the potential of aquatic resources including seagrass, coral reefs, reef fish and beautiful underwater charm. Cultural potential includes dances, traditional ceremonies and local wisdom "Sasi Laut" activities. Natural and cultural potential and community and stakeholder support, is in demand by domestic tourists and foreign tourists, especially beach attraction, snorkeling and diving. Communities around the area are generally coastal communities who have a dependency on water resources. Livelihoods are generally fishermen (51%) with a dominant education level of elementary school (45%), and people with high productive age (74.95%). Community participation in marine ecotourism activities includes sea and land transportation, lodging and homestay, Restaurant and Culinary, shop and tour guide. This community participation contributes to the economic value derived from foreign tourist expenditure of Rp.884,947 / day. The results of stakeholder identification show that each stakeholder still carries out its functions and roles separately, both key stakeholders, and key stakeholders. For this reason, collaboration and coordination between stakeholders is needed by collaborative management (Collaborative management).

Keywords: community-based ecotourism, stakeholders, community participation, economic value of ecotourism

ABSTRAK. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengembangan ekowisata bahari berbasis partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan melakukan observasi dan inventarisasi bentuk keterlibatan masyarakat dengan cara wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ekowisata bahari di TWA Pulau Marsegu sangat beragam terutama pada ekosistem pesisir maupun

perairan meliputi komunitas hutan mangrove di teluk pelita jaya dan teluk kotania dan potensi sumberdaya perairan meliputi padang lamun, terumbu karang, ikan karang serta pesona bawah laut yang indah. Potensi budaya meliputi tari-tarian, upacara adat dan kearifan lokal "Sasi Laut". Potensi alam dan budaya serta dukungan masyarakat dan stakeholder, diminati oleh wisatawan nusantara dan mancanegara, terutama atraksi wisata pantai, *snorkeling* dan *diving*. Masyarakat sekitar kawasan umumnya merupakan masyarakat pesisir, yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya perairan. Mata pencaharian umumnya nelayan (51 %) dengan tingkat pendidikan dominan SD (45%), dan masyarakat dengan usia produktif tinggi (74,95%). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata bahari meliputi jasa transportasi laut dan darat, jasa penginapan dan homestay, Jasa Rumah Makan dan Kuliner, Jasa toko dan pemandu wisata. Partisipasi masyarakat ini memberikan kontribusi nilai ekonomi yang berasal dari pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar Rp.884.947/hari. Hasil identifikasi *stakeholder* menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* masih menjalankan fungsi dan perannya secara terpisah, baik *stakeholder* kunci, maupun *stakeholder* utama. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar *stakeholder* dengan melakukan pengelolaan yang bersifat kolaboratif (*Collaboratif management*).

Kata Kunci: Ekowisata berbasis masyarakat, *stakeholder*, partisipasi masyarakat, nilai ekonomi ekowisata.

Penulis untuk korespondensi : h_lollo@yahoo.com / henderina.lolloltery@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Maluku merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 1.450 pulau dengan sumberdaya alam yang tinggi. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki sumberdaya alam pesisir dan laut yang melimpah seperti pantai yang indah, hutan mangrove, terumbu karang, ikan, lamun dan berbagai biota laut dan pesisir lainnya. Potensi sumberdaya dan jasa lingkungan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan namun rentang terhadap pemanfaatan yang berlebihan. Oleh karena itu dalam pemanfaatannya dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan secara signifikan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu melalui pemanfaatan jasa lingkungan berbasis ekowisata bahari.

Ekowisata bahari berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat lokal dan mendukung upaya konservasi dan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut (Walters and Samways, 2001). Upaya pengembangan ekowisata bahari di Maluku dapat dilakukan mengingat potensi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil tersedia dengan melimpah. Kondisi ini didukung oleh potensi sumberdaya yang melimpah. Hal ini sesuai dengan Baiquni (2015) yang menyatakan bahwa Pulau-pulau kecil dapat

menjadi destinasi ekowisata karena menyediakan potensi sumberdaya alam melimpah. Konsep ekowisata ini secara luas dapat meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan, memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Das dan Chatterjee, 2015)

Salah satu kawasan yang menjadi destinasi ekowisata di Maluku adalah Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Marsegu, yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas kawasan 9.023 Ha. Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Marsegu, merupakan kawasan konservasi perairan yang memiliki sumberdaya alam pesisir dan perairan yang potensial berupa hutan mangrove, pantai, terumbu karang, ikan karang, lamun dan berbagai biota laut. Potensi sumberdaya ini dapat menjadi objek dan daya tarik potensial bagi wisatawan (BKSDA, 2014).

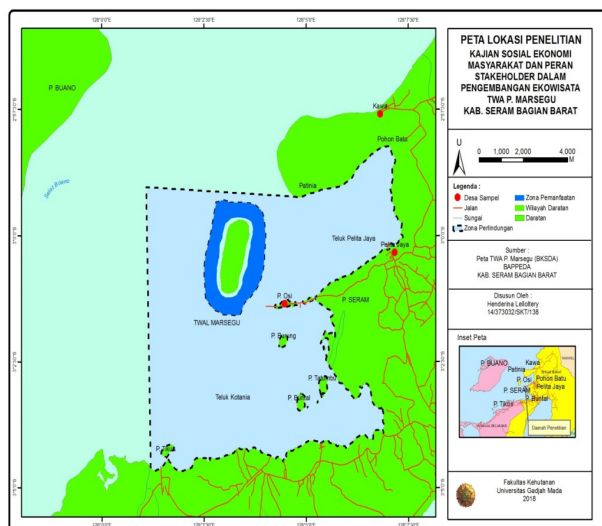
Potensi sumberdaya tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan ekowisata bahari. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti minimnya infrastruktur, pemahaman masyarakat tentang lingkungan sekitar masih sangat terbatas, dukungan pemerintah terbatas serta kurangnya regulasi terkait dengan kegiatan pariwisata. Faktor-faktor ini telah berkontribusi terhadap lambatnya pengembangan

ekowisata di kawasan TWA Pulau Marsegu. Untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam tersebut diperlukan analisis yang komprehensif melalui pengembangan ekowisata sesuai kondisi masyarakat sekitar dan peran stakeholder. Untuk itu telaah lebih lanjut mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan peran stakeholder dapat menjadi landasan kebijakan pengembangan ekowisata secara berkelanjutan perlu untuk dilakukan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengembangan ekowisata dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholder dalam kegiatan ekowisata.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan TWA Pulau Marsegu, yaitu Pulau Marsegu dan Pulau Osi selama tiga bulan mulai dari bulan Mei sampai Agustus 2018. Peta Lokasi sampel kawasan TWA Pulau Marsegu disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kawasan TWA Pulau Marsegu, GPS, Kamera, sedangkan bahan yang digunakan yaitu kuisioner dan alat tulis menulis.

Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif yang didekati dengan teknik observasi. Metode diskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak dan upaya mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan lapangan, wawancara mendalam (*Indepth interview*) dan *Focus group discussion* (FGD).

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi 1) karakteristik masyarakat; 2) Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata; 3) Nilai ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata; 4) identifikasi Interaksi masyarakat dengan sumberdaya alam (kearifan lokal) dan 5) Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Pengumpulan data masyarakat dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu memilih masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekowisata. Wawancara dilakukan pada 2 desa sampel yaitu desa Pelita Jaya dan dusun Pulau Osi. Sedangkan desa Kawa untuk mengetahui kondisi budaya masyarakat. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang untuk masing-masing desa. Sedangkan data kearifan lokal masyarakat dilakukan di desa Kawa sebagai salah satu desa adat di sekitar TWA Pulau Marsegu. Wawancara juga dilakukan terhadap stakeholder yang terlibat meliputi BKSDA Maluku, dinas Kehutanan Propinsi Maluku, Bapeda Kab.SBB, dinas Pariwisata Kab.SBB, Pemerhati lingkungan, swasta dan peneliti.

Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data pada instansi-instansi terkait dengan penelitian meliputi, kondisi fisik kawasan, data statistik wilayah dan data penunjang lainnya melalui laporan, buku dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Karakteristik Masyarakat

Masyarakat sekitar kawasan TWA Pulau Marsegu merupakan masyarakat pesisir yang mendiami wilayah pesisir Pulau Seram bagian barat khususnya sekitar Teluk Kotania dan Teluk Pelita Jaya. Umumnya merupakan masyarakat pendatang dan asli pulau Seram. Masyarakat pendatang berasal dari suku Buton Propinsi Sulawesi Tenggara namun telah mendiami pesisir pulau Seram sejak leluhur. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan, sehingga memanfaatkan sumberdaya perairan sebagai sumber penghidupan, sebagai kebutuhan pokok maupun untuk usaha perikanan seperti budidaya rumput laut dan tambak ikan. Menangkap ikan dan memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat.

Karakteristik masyarakat yang diteliti meliputi umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Pada kategori tingkat umur menunjukkan bahwa usia produktif (21 – 59 tahun) menempati urutan tertinggi pada kedua desa sampel yaitu desa Pelita Jaya sebanyak 63,33 % dan dusun Pulau Osi sebanyak 86,66 %. Mata pencaharian, pada kedua sampel umumnya nelayan yaitu desa Pelita Jaya sebanyak 53,3 % dan dusun Pulau Osi sebanyak 50 %. Setelah itu wiraswasta 26,6 % di desa Pelita Jaya dan 33,3 % di dusun Pulau Osi. Mata pencaharian lain seperti petani dan PNS/Polri menempati persentasi yang rendah. Untuk kategori tingkat pendidikan kedua sampel umumnya masyarakat memiliki tingkat pendidikan Sekolah dasar (SD).

2. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

2.1 Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat dalam kegiatan ekowisata bahari dapat diketahui dari pengetahuan, sikap dan harapan dalam mendukung pengembangan

ekowisata bahari. Pengetahuan mencakup keberadaan dan potensi kawasan TWA Pulau Marsegu. Sikap ditunjukkan dengan adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata bahari pada TWA Pulau Marsegu. Harapan masyarakat mencakup peningkatan fasilitas wisata dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa pengetahuan tentang status kawasan TWA sebagai kawasan konservasi cukup besar, sebanyak 54 responden (90%) mengetahui status kawasan sedangkan hanya 6 responden (10%) yang belum mengetahui bahwa desa/dusun termasuk kawasan konservasi. Namun, pengetahuan tentang objek wisata seluruh responden (100%) mengetahui bahwa kawasan sebagai destinasi wisata, mengingat desa Pelita Jaya dan dusun Pulau Osi sudah dikenal sebagai kawasan wisata. Pengetahuan tentang status kawasan tidak secara langsung menjadikan masyarakat memahami berbagai kegiatan terutama kegiatan-kegiatan perlindungan dan pelestarian kawasan. Kenyataannya masih ada penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan (bom ikan dan potas) dalam melakukan penangkapan ikan di sekitar kawasan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan peningkatan pengawasan terhadap kawasan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengawasan dan pengamanan kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sumberdaya sehingga masyarakat dengan sadar akan menjaga dan mengawasi sumberdaya disekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ross dan Wall (1999) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat lokal dapat dilakukan melalui meningkatkan kesadaran terhadap sumber daya alam dan budaya merupakan langkah strategis untuk menempatkan mereka sebagai bagian integral dari pembangunan ekowisata bahari.

Sikap masyarakat dalam rencana pengembangan potensi ekowisata bahari, masyarakat (100%) mendukung upaya

pengembangan kawasan sebagai destinasi ekowisata bahari. Sedangkan, harapan masyarakat terhadap rencana pengembangan ekowisata bahari terkait peningkatan fasilitas wisata sebanyak 35 responden (58,3%) berupa peningkatan fasilitas wisata berupa perbaikan jembatan penghubung dari desa pelita jaya ke dusun pulau Osi, perbaikan jalan, pembangunan fasilitas MCK umum, pengelolaan lingkungan pantai pasir putih, dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 25 orang (41,6%), berupa pelatihan dan pemberian modal usaha. Harapan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Harapan-harapan masyarakat bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh Mill (2000) menyatakan bahwa "Pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan ekonomi yang dibawa ke dalam kawasan". Hal ini sangat beralasan karena pengembangan ekowisata bahari dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat lokal di lingkungan alamnya (Stronza dan Gordillo, 2008). Untuk mendapat manfaat yang optimal, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu, (1) Manfaat ekonomi dari ekowisata bahari harus dapat diakses bagi masyarakat, (2) masyarakat memiliki hak untuk berusaha secara aman, (3) Kegiatan ekowisata bahari harus mampu mempromosikan tujuan-tujuan keadilan dan politik bagi masyarakat lokal dan (4) masyarakat memiliki kapabilitas untuk membuat keputusan terhadap penggunaan sumberdaya di wilayahnya (Sylvie and Metha, 2006).

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Ekowisata

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata bahari meliputi partisipasi masyarakat dalam aspek pengawasan dan pengamanan kawasan, pembangunan fasilitas wisata dan penyedia jasa transportasi dan kuliner. Masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pengamanan kawasan masih sangat minim, hanya terdapat satu orang masyarakat

lokal dan dibantu satu orang tenaga Polhut dari BKSDA Resort Piru sehingga kurang efektif dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti perahu motor untuk mobilitas tenaga pengawas menjadi faktor pembatas mengingat luasnya wilayah kawasan (9.023 Ha). Kondisi demikian memerlukan dukungan dari masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan. Pengawasan yang intensif dapat dilakukan dengan caramengatur waktu pengawasan secara periodik, peningkatan jumlah personil yang melibatkan masyarakat sekitar dan menetapkan regulasi terkait pemanfaatan kawasan. Hal ini didukung oleh Rhormens *et al.* (2017) menyatakan bahwa pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dan kemitraan antara *stakeholder* yang terlibat menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekowisata bahari.

Partisipasi dalam penyedia fasilitas wisata berupa pembuatan dan pemeliharaan jembatan kayu dalam hutan mangrove masih dilakukan oleh masyarakat lokal. Masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan sarana transportasi darat (ojek) dan laut (perahu motor), penyediaan jasa rumah makan dan usaha kuliner, penginapan dan *homestay*, pemandu wisata dan porter serta petugas parkir. Partisipasi masyarakat ini memberikan keragaman kesempatan kerja dan peluang usaha, menyediakan lapangan kerja dan memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Damanik (2012) bahwa ekowisata di pulau-pulau kecil menciptakan lapangan kerja yang beragam bagi masyarakat. Terbukanya lapangan kerja dari kegiatan ekowisata bahari dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dengan membentuk hubungan saling menguntungkan atau adanya simbiosis mutualisma antara ekowisata bahari, masyarakat lokal dengan wilayah-wilayah alami (Stronza dan Gordillo, 2008).

Partisipasi masyarakat ini masih terbatas mengingat lemahnya koordinasi dengan *stakeholder* dan kemampuan masyarakat lokal untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekowisata bahari. Hal ini karena kawasan TWA

Pulau Marsegu merupakan kawasan yang belum terbangun sistem pariwisata secara utuh. Pemerintah daerah belum dapat mengalokasikan kemampuan secara utuh untuk mendukung kegiatan wisata baik dalam hal finansial maupun sumberdaya manusia dalam pengelolaan kawasan sebagai tujuan wisata. Peran masyarakat masih terbatas sebagai penyedia sarana akomodasi, konsumsi, jasa transportasi, pemandu wisata, sehingga dapat dikatakan bahwa peran masyarakat sebagai penyedia layanan pendukung wisata (Harrison, 1995).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata bahari masih bersifat pasif dan tergantung dari permintaan wisatawan di dalam kawasan. Dengan melihat kemampuan masyarakat yang masih sangat rendah dibutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, berupa pemberdayaan masyarakat dan kerjasama *stakeholder*. Kegiatan masyarakat dalam hubungan dengan ekowisata bahari dapat dijumpai pada berbagai kegiatan menyangkut bidang kesenian meliputi tari-tarian adat, upacara adat pernikahan, upacara adat yang berhubungan dengan leluhur dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perairan seperti "Sasi laut". Bentuk Sasi laut merupakan upaya konservasi secara tradisional untuk mengatur masa panen dari produk yang disasi, misalnya ikan dan hasil laut lainnya.

3. Kontribusi Ekonomi dari Kegiatan Ekowisata Bahari

Kegiatan ekowisata bahari bukan saja memberi akses terhadap konservasi sumberdaya alam tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan di tinjau dari aspek lingkungan (Sylvie dan Mehta, 2006). Dampak ekowisata bahari terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal terdiri dari dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung berupa peluang kerja, peningkatan pendapatan dan masukan bagi pengelola kawasan. Dampak tidak langsung berupa ada tidaknya diversifikasi kegiatan ekonomi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekowisata bahari telah mampu memberikan peluang

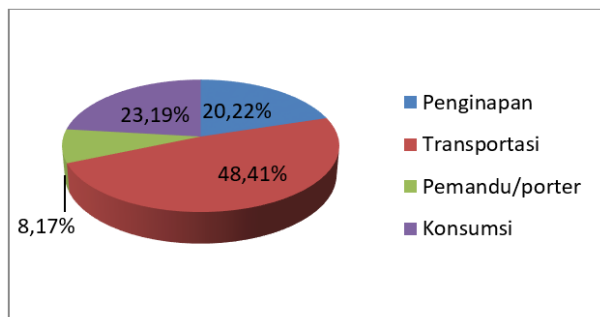
usaha dan peluang kerja bagi masyarakat sekitar kawasan TWA Pulau Marsegu yaitu masyarakat dusun pulau Osi, desa Pelita Jaya dan desa-desa sekitar kawasan.

Beberapa jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat berhubungan dengan penyediaan sarana pendukung berupa kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Jenis usaha tersebut seperti jasa perahu motor, ojek, pemilik penginapan dan *homestay*, jasa porter dan pemandu wisata, rumah makan dan kios. Dari jenis usaha tersebut masyarakat memperoleh pendapatan namun besarnya pendapatan yang diperoleh tergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan, lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke TWA Pulau Marsegu belum didata dengan baik, namun hasil wawancara dengan pemilik penginapan indigo dan penginapan Daud Moon Resort diketahui bahwa wisatawan yang mengunjungi kawasan pada tahun 2015, terdiri dari wisatawan nusantara rata-rata 30 orang/bulan atau 360 orang/tahun sedangkan wisatawan mancanegara 8 orang/bulan atau 96 orang/tahun. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan masih rendah namun masyarakat dapat menikmati pendapatan dari kunjungan wisatawan karena belanja wisatawan semuanya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat lokal.

Kontribusi ekowisata bahari terhadap masyarakat lokal, maka diperhitungkan nilai total pengeluaran wisatawan (*total expenditure*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja wisatawan selama kunjungan dapat dihitung dari pengeluaran biaya penginapan berkisar (Rp.300.000-Rp.750.000/kamar/hari), biaya ojek untuk memasuki dusun Pulau Osi sepanjang jembatan kayu (15.000 – 20.000/orang), sedangkan biaya ojek dari Piru ibu kota Kabupaten ke kawasan TWA Pulau Marsegu (Rp.50.000/orang), biaya mobil dari Piru ke Pelita Jaya (Rp.500.000/mobil carteran), Biaya perahu motor (Rp.200.000/3 jam), Jasa pemandu wisata (Rp.100.000/hari) dan biaya konsumsi. Untuk mengestimasi nilai pendapatan masyarakat dari berbagai jenis usaha dilakukan analisis deskriptif

dengan menghitung nilai standar deviasi.

Nilai total pendapatan masyarakat ini merupakan nilai total pengeluaran wisatawan (*total expenditure*). Total pengeluaran wisatawan mancanegara rata-rata sebesar Rp.884.947,-. Berdasarkan total pengeluaran tersebut kemudian dapat dilihat distribusi pengeluaran wisatawan pada gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Total Pengeluaran Wisatawan

Berdasarkan gambar 2, distribusi pengeluaran wisatawan terbesar adalah pada jasa transportasi sebesar 49% terdiri atas jasa ojek 9,81%, perahu motor 13,38% dan mobil carteran 25,21%. Hal ini disebabkan karena kawasan TWA Pulau Marsegu merupakan kawasan konservasi laut sehingga untuk menjangkanya harus menggunakan sarana transportasi darat dan laut. Berdasarkan pengeluaran wisatawan maka pengeluaran untuk penginapan, ojek, perahu motor, pemandu/porter dan konsumsi merupakan pengeluaran yang dapat diserap oleh perekonomian lokal yaitu sebesar 74,78% atau rata-rata Rp.661.789. Nilai pendapatan ini merupakan nilai pendapatan relatif masyarakat karena pendapatan masyarakat dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, pelaksanaan event tertentu dan lama tinggal wisatawan.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Budayalokal merupakan salah satu sumber penting ekowisata bahari. Keunikan budaya dengan isolasi geografis pulau-pulau kecil dapat menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. Masyarakat Kabupaten SBB sebagian besar terdiri dari dua etnis, yaitu penduduk asli Pulau Seram dan masyarakat etnis suku buton. Masyarakat Etnis suku

buton sebenarnya telah menetap sebagai bagian masyarakat Pulau Seram sejak leluhur. Hubungan sosial antara masyarakat asli pulau Seram dengan suku Buton berjalan dengan baik, sehingga masyarakat suku Buton telah memiliki keterkaitan secara emosi dan sosial dengan masyarakat asli Pulau Seram.

Masyarakat suku buton yang umumnya menetap di daerah pesisir dengan budaya yang khas seperti bentuk rumah panggung, telah mempengaruhi corak fasilitas penginapan di lokasi wisata berupa penginapan terapung yang dapat dijumpai di Pulau Osi dan Dusun Pelita Jaya. Penginapan terapung ini memberikan ciri khas bagi lokasi wisata di TWA Pulau Marsegu.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, ciri khas kekeluargaan dikenal dengan istilah "*masohi atau gotong royong*" masih berakar dalam kehidupan masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial seperti pembangunan rumah ibadah (Masjid), pembangunan rumah adat atau "*Balieo*", kerja bakti untuk membersihkan lingkungan desa maupun pembangunan rumah masyarakat dilakukan secara bersama-sama. Bentuk hubungan sosial masyarakat ini sudah berlangsung turun temurun dan dilakukan oleh masyarakat adat maupun pendatang. Bentuk aktivitas "*masohi*" yang melibatkan laki-laki dan perempuan, usia tua dan muda dengan beragam aktivitasnya tanpa disadari telah membentuk daya tarik bagi orang yang melihatnya. Kondisi budaya masyarakat ini didukung oleh kelembagaan dalam desa seperti adanya perangkat desa yang disebut "*saniri negeri*". Lembaga dalam desa/negeri ini, bertugas mengatur jalannya pemerintah dalam desa atau dusun.

Dalam hubungan dengan masalah kepariwisataan, kedua etnis masyarakat ini memiliki peran yang sama. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Dusun pulau Osi dan Desa Pelita Jaya umumnya adalah suku buton dapat bekerjasama dengan masyarakat asli pulau Seram dalam kegiatan ekowisata bahari. Lokasi wisata di dusun Pulau Osi dan desa Pelita jaya menyebabkan masyarakat lokal menjadi penyedia berbagai sarana

pendukung dan kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Hal ini berdampak pada terbukanya kesempatan berusaha dan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini didukung oleh pendapat West dan Carrier (2004) menyatakan bahwa kegiatan ekowisata bahari berdampak pada masyarakat lokal dan menghormati adat istiadat dari masyarakat lokal di destinasi wisata.

Berbagai aktivitas dan budaya masyarakat yang dapat mendukung kegiatan ekowisata bahari berupa tari-tarian, seperti tari "Jala" yang dilakukan saat buka "Sasi laut" yang diikuti oleh makan bersama atau sebutan masyarakat lokal dengan istilah "Makan patita". Upacara adat dilakukan ketika ada acara resmi di desa seperti pelantikan raja atau ketika ada masalah-masalah penting yang terjadi di desa. Aktivitas-aktivitas adat dapat menjadi daya tarik wisata di sekitar kawasan TWA Pulau Marsegu.

Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Perairan.

Masyarakat lokal umumnya memiliki keterkaitan dengan alam sekitarnya. Berkes *et al.* (2000) menyatakan bahwa masyarakat lokal menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkungan sekitar dan memiliki pengetahuan ekologis secara tradisional yaitu sekumpulan pengetahuan, praktik dan keyakinan yang secara akumulatif berkembang dengan proses-proses yang diadaptasi dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat di Maluku memiliki bentuk pengelolaan sumberdaya secara tradisional berdasarkan adat dan tradisi yang telah ada sejak leluhur, dan dikenal dengan "Sasi" (Kisya, 2000). Kegiatan Sasi telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kisya (2000), mengartikan "Sasi" sebagai larangan untuk mengambil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan sumber daya hayati. Kegiatan Sasi meliputi *Sasi Adat* atau *Sasi Negeri* dan *Sasi gereja*. Sasi Adat merupakan sistem adat dalam suatu persekutuan hukum, dan yang bertanggung jawab untuk mengadakannya adalah pemerintah adat. Sasi adat terdiri dari *sasi darat* dan *sasi laut*.

Salah satu desa adat di sekitar kawasan TWA Pulau Marsegu adalah Desa Kawa. Masyarakat melakukan "Sasi Laut" yaitu larangan pengambilan sumberdaya perairan seperti ikan, udang, teripang, lobster dan sumberdaya laut lainnya. Kegiatan "Sasi laut" ditandai dengan pemasangan daun kelapa berbentuk segi tiga yang ditempatkan di pesisir pantai sebagai tanda dimulainya "Sasi laut". Bentuk "Sasi laut" di desa Kawa ini memiliki aturan pemanenan dan pengawasan terhadap sumberdaya perairan yang berbeda dengan desa-desa lain di Maluku. Pemanenan sumberdaya hasil ikan dan laut lainnya dilakukan setiap saat dimana masyarakat diijinkan memancing ikan tanpa menggunakan jaring sampai pada jarak 0,5 mil dari garis pantai. Kegiatan pengambilan hasil laut melewati batas jarak tersebut hanya dilakukan jika terdapat acara di desa seperti pembangunan masjid. Demikian juga pengawasan *Sasi Laut* di desa Kawa berbeda dengan Sasi di tempat lain di Maluku. Umumnya di Maluku pengawasan *Sasi*, dilakukan oleh lembaga adat yang disebut "Kewang". Namun, *Sasi laut* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kawa, tidak dilakukan oleh "Kewang" tetapi dilakukan oleh seluruh nelayan di dalam desa. Pembagian pengawasan terhadap sumberdaya laut dilakukan oleh "Penjaga Laut". Penjaga laut ini terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu (1) Penjaga tuna/tonda. Penjaga ini terdiri dari 100 orang, mereka menjaga laut dengan dilengkapi dengan motor laut, karena luas wilayah laut yang dijaga sejauh 10 mil dari garis pantai. (2) Penjaga Sampan. Penjaga ini terdiri dari 70 orang, mereka menjaga laut dengan dilengkapi dengan motor laut, karena luas wilayah laut yang dijaga sejauh 500 meter sampai 1 mil dari garis pantai. Bentuk kearifan lokal "Sasi laut" merupakan bagian dari keunikan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata. Hal ini sejalan dengan Camphell (1999) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada kearifan lokal. Keunikan sumberdaya alam dan budaya memberikan pengalaman terintegrasi bagi wisatawan dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberdayakan budaya lokal (Ross dan Wall, 1999).

Keunikan budaya lokal, berupa kearifan lokal “sasi laut”, tari-tarian, upacara adat, kehidupan sosial masyarakat pesisir membutuhkan suatu perencanaan yang berkembang dari masyarakat. Merumuskan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial dan budaya dari pengembangan ekowisata bahari dan memperluas kemungkinan untuk membangun masyarakat pulau-pulau kecil untuk memperoleh keuntungan ekonomi lainnya.

Manfaat pengembangan kearifan lokal sebagai objek dan daya tarik wisata selain untuk menambah kunjungan wisatawan untuk belajar tentang bentuk kearifan lokal tersebut, tetapi bermanfaat juga untuk mempertahankan bentuk kearifan lokal yang merupakan identitas masyarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan darat maupun laut. Masyarakat akan termotivasi untuk mengembangkan kelembagaan yang menyangkut aturan, norma dan nilai yang harus dikembangkan guna penguatan bentuk kearifan lokal tersebut.

Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata Bahari di TWA Pulau Marsegu

Identifikasi Stakeholder

Identifikasi *stakeholder* merupakan para pihak yang berkaitan dan berkepentingan dalam pengembangan ekowisata bahari. Identifikasi *stakeholder* dilakukan berdasarkan karakteristik *stakeholder*. Menurut Crosby (1991) dalam Zubayr *et al.* (2014), meliputi *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* pendukung.

1) Stakeholder Primer (Utama)

Stakeholder utama (primer) merupakan para pihak yang terkena dampak langsung, baik positif maupun negatif oleh suatu program atau proyek serta mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholder* primer (utama) adalah masyarakat di dua desa sampel karena kegiatan ekowisata bahari yang dikembangkan nantinya akan berdampak bagi masyarakat sekitar daerah tujuan wisata.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, partisipasi masyarakat di dua desa sampel cukup baik, mereka terlibat sebagai pelaku wisata dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang aktivitas wisatawan selama berada di lokasi wisata. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam menunjang aktivitas wisatawan seperti menjadi jasa pemandu wisata (guide lokal), jasa porter, menyediakan jasa transportasi darat berupa sepeda motor (ojek) dan transportasi laut berupa perahu motor, menyediakan penginapan terapung dengan disain lokal, menyediakan rumah makan, warung-warung kecil yang menyediakan hasil-hasil laut dari masyarakat lokal dan menjadi pegawai penginapan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sampai saat ini masyarakat masih menjadi pelaku usaha. Bentuk keterlibatan masyarakat di desa-desa sampel di golongan dalam partisipasi pasif. Hal ini sesuai dengan Horisson (1995) dalam Damanik (2013) menyatakan bahwa masyarakat masih memainkan perannya secara pasif karena jumlah masyarakat yang terlibat masih sedikit. Masyarakat masih berfungsi sebagai penyedia layanan pendukung.

Dalam hubungan dengan fungsinya sebagai penyedia layanan pendukung maka masyarakat sering menggunakan sumberdaya alam disekitarnya secara bebas dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan karena; 1) belum ada aturan-aturan dalam pengelolaan kawasan, 2) belum ada lembaga lokal yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pariwisata, 3) Lemahnya pengawasan dari *stakeholder* yang terlibat.

Kondisi ini terlihat dari pembangunan penginapan terapung di kedua desa sampel masih “bebas” dilakukan oleh masyarakat yang memiliki modal untuk membuka usahanya. Kondisi ini jika berlangsung dalam jangka waktu lama maka dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dalam objek wisata. Oleh karenanya di beberapa tempat strategi pengembangan dilakukan dengan cara pemulihan lahan terdampak dan sumberdaya yang terpengaruh (Silvy dan Metha, 2006).

Mencermati bentuk partisipasi masyarakat, maka bentuk ini belum optimal dalam mendukung peran stakeholder sebagai *stakeholder* kunci, karena masyarakat hanya menjadi pelaku usaha dan tidak terlibat dalam proses perencanaan kegiatan yang akan dikembangkan.

2) *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci adalah para pihak yang memiliki kewenangan legal dalam hal mengambil keputusan, Crossby (1991) dalam Zubayr (2014). *Stakeholder* kunci diidentifikasi berdasarkan kewenangannya dalam mengambil keputusan terkait dengan proses penetapan kawasan Taman Wisata Alam.

Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan jasa lingkungan (ekowisata bahari) di TWA Pulau Marsegu dan menjadi *stakeholder* kunci dalam pengelolaannya.

Kegiatan pengembangan ekowisata bahari menjadi program pemerintah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Pada tingkat propinsi dilakukan oleh BKSDA Wilayah 2 Maluku dan Maluku Utara sebagai unit pelaksana teknis. Pengembangan potensi pariwisata di Maluku khususnya dalam wilayah kewenangan BKSDA, sejalan dengan Visi TWA Pulau Marsegu yaitu *"Pemanfaatan Taman Wisata Alam Pulau Marsegu secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan"*. Visi ini dijabarkan dalam bentuk Misi rencana pengelolaan TWA Pulau Marsegu yaitu *penggalan dan pengembangan potensi TWA dalam rangka pengelolaan pariwisata alam, peningkatan promosi dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan membangun kelembagaan pariwisata alam*. Dalam mewujudkan Visi dan Misi TWA Pulau Marsegu, sampai saat ini BKSDA masih berfungsi dalam ranah perlindungan dan pengawasan kawasan. Peran dalam pengelolaan dan pengembangan wisata belum dilakukan. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan atau

regulasi terhadap pengelolaan dan pengembangan ekowisata bahari, belum adanya pengaturan pengunjung, belum ada biaya/tiket masuk kawasan secara resmi diatur dalam peraturan yang harus ditaati oleh wisatawan. Kondisi saat ini untuk memasuki kawasan, wisatawan hanya membayar sumbangan sukarela yang oleh desa diperuntukkan bagi biaya pemeliharaan jembatan kayu menuju dusun Pulau Osi. Pemberlakuan surat ijin masuk kawasan (SIMAKSI) hanya diberlakukan kepada wisatawan yang melapor ke BKSDA saat memasuki kawasan dengan biaya Rp.150.000/6 bulan. Sedangkan, bagi wisatawan atau masyarakat yang memasuki kawasan tanpa melapor ke BKDA Maluku maupun Resort BKSDA wilayah 2 di Piru ibu kota Kabupaten SBB, maka tidak dikenakan biaya masuk kawasan dan hanya membayar uang sukarela bagi desa. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada pos jaga, petugas jaga dan belum ditentukan tarif masuk kawasan. Kondisi ini menggambarkan belum optimalnya pengelolaan kawasan, sehingga masyarakat dan wisatawan dapat bebas memasuki kawasan. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kondisi lingkungan kawasan dan sumberdaya alam yang ada didalamnya.

Pada tingkat Kabupaten, Badan Perencanaan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) periode 2010-2020. TWA Pulau Marsegu ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan wisata bahari. Hal ini memberi dukungan bagi pengembangan ekowisata bahari di Kab.SBB terutama dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat menunjang kegiatan ekowisata bahari. Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan Pulau Osi sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan Pariwisata. Lembaga-lembaga ini memiliki peran dalam pengembangan produk wisata, promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, yang berorientasi pada kelestarian lingkungan alam dan budaya lokal serta memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Untuk itu, TWA Pulau Marsegu memiliki target pencapaian pengelolaan ekowisata

bahari yang berorientasi pada potensi kawasan meliputi potensi sumberdaya perairan, bentang alam laut (*sea scape*), keindahan alam dan berbeda dengan produk wisata di tempat lain. Potensi yang ada memiliki unsur edukatif terhadap lingkungan, konservasi lingkungan serta membangun kemitraan dengan *stakeholder* terkait serta melibatkan masyarakat sekitar kawasan.

Stakeholder Pendukung

Stakeholder pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian. Crosby (1991) dalam Zubayr (2014). *Stakeholder* ini dapat menjadi fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini *stakeholder* pendukung yaitu akademisi dan pihak Swasta. Sedangkan, LSM sampai saat ini belum terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan ekowisata bahari di TWA Pulau Marsegu.

Peran akademisi dan para peneliti berhubungan dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan TWA Pulau Marsegu seperti praktikum dan lokasi penelitian mahasiswa Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan, Fakultas Perikanan dan Fakultas MIPA dan lokasi penelitian dari LIPI Maluku.

Stakeholder pendukung umumnya merupakan pengguna kawasan, sehingga dalam perencanaannya tidak langsung berhubungan dengan *stakeholder* pendukung, tetapi dalam hubungan dengan upaya edukasi terhadap masyarakat maupun wisatawan dan *stakeholder* yang lain, maka perlu dilibatkan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan terutama berhubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lokasi TWA Pulau Marsegu.

Identifikasi *stakeholder* menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* masih bekerja secara parsial dan belum ada dalam satu kesatuan pengembangan. Masih terdapat *Gaps* antara *stakeholder* kunci (BKSDA) dan *stakeholder* utama

(masyarakat lokal). Pihak BKSDA masih menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kawasan dan belum secara nyata melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan wisata. Pendampingan terhadap masyarakat belum dilakukan secara nyata. Sementara masyarakat menjalankan perannya secara sendiri dalam hubungan dengan penyediaan berbagai sarana dan fasilitas untuk kegiatan ekowisata bahari. Hasil wawancara dengan *stakeholder* kunci (BKSDA) dan *stakeholder* utama (masyarakat lokal) (Kepada dusun pulau Osi dan Pelita Jaya) menunjukkan bahwa sampai saat ini belum adanya hubungan yang sinergis antara *stakeholder* sehingga pengembangan ekowisata bahari belum dilakukan secara optimal. Peran BKSDA masih terbatas pada pengawasan kawasan dan belum ada implementasi kegiatan nyata dilapangan sedangkan masyarakat sudah ada pada tatanan keterlibatan dalam kegiatan ekowisata bahari secara nyata. Hal ini terlihat dari penyediaan fasilitas ekowisata bahari dilakukan oleh masyarakat secara swadaya seperti pembangunan jembatan kayu, penyediaan sarana akomodasi berupa penginapan terapung, rumah makan, kios-kios kecil, jasa transportasi darat (ojek), dan transportasi laut (Perahu motor). Perbaikan jembatan kayu yang menghubungkan daratan pulau seram dan dusun pulau Osi melewati hutan mangrove selama ini masih dilakukan masyarakat secara swadaya.

Hasil wawancara dengan *stakeholder* menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan ekowisata bahari di TWA Pulau Marsegu disebabkan karena beberapa faktor seperti; 1) belum ada suatu lembaga yang secara kolaboratif dapat menampung aspirasi dan kepentingan semua *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata bahari. Hal ini terlihat dari belum adanya kegiatan kerjasama dan koordinasi antar *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata bahari seperti PEMDA Propinsi/Kab, Dinas Pariwisata Kabupaten, BKSDA, Biro travel dan instansi terkait khususnya dalam hubungan dengan pemanfaatan produk wisata, promosi, pengembangan sarana dan

fasilitas wisata, aksesibilitas maupun pendampingan terhadap masyarakat. Program kegiatan yang dilakukan masih secara parsial dan belum secara komprehensif dan terpadu antar *stakeholder*. Peran masing-masing *stakeholder* belum terintegrasi dengan baik, integrasi ini penting sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat, 2) belum adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan dalam kawasan yang menjadi regulasi bersama antar *stakeholder*. Regulasi tersebut dalam mengatur pemanfaatan potensi produk dan pasar wisata di TWA Pulau Marsegu maupun sanksi-sanksi untuk menjaga kawasan dari berbagai bentuk kegiatan yang dapat merusak sumberdaya alam dalam kawasan wisata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masyarakat sekitar kawasan umumnya merupakan masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya perairan. Mata pencaharian umumnya nelayan (51 %) dengan tingkat pendidikan dominan SD (45%) namun memiliki usia produktif yang tinggi (74,95%). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata bahari berupa jasa transportasi laut dan darat, jasa penginapan, Jasa Rumah Makan/Kuliner, Jasa toko/ kios dan pemandu/porter. Partisipasi masyarakat ini memberikan kontribusi nilai ekonomi yang berasal dari pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar Rp.884.947/hari.

Hasil identifikasi *stakeholder* menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* masih menjalankan fungsi dan perannya secara terpisah, baik *stakeholder* kunci, maupun *stakeholder* utama. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar *stakeholder* dengan melakukan pengelolaan yang bersifat kolaboratif (Collaboratif management) dengan memadukan semua *stakeholder* yang terlibat meliputi masyarakat, BKSDA, pemerintah daerah, swasta dan peneliti.

Saran

Perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap konsep ekowisata dan manfaatnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan aktif terlibat dalam kegiatan ekowisata.

Dukungan seluruh *stakeholder* diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekowisata bagi kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkes Fikret, Johan Colding, Carl Folke, 2000. Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*, Vol. 10, No. 5, pp. 1251-1262
- Balai Konservasi Sumberdaya Alam., 2010. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Pulau Marsegu periode 2011- 2030 Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, Ambon.
- Baiquni, M., 2007 Strategi Penghidupan di Masa Krisis, Belajar dari Desa. Yogyakarta: Ideas Media
- Damanik, J dan Weber.H.F., 2006. Perencanaan Ekowisata (Dari Teori ke Aplikasi). Penerbit Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM dan penerbit Andi Yogyakarta.
- Damanik, J., 2013. Social and Cultural Dimensions of Ecotourism Development in Small Island dalam *Ecotourism Destinations in Archipelago Countries*. Editor Baiquni, M., Janianton D dan Erda Rindarsih. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Campbell, L. 1999. Ecotourism In Rural Developing Communities. *Annals Of Tourism Research* 26:534–553.
- Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A panacea or a predicament? *Tourism Management Perspectives*, 14, 3–16.
- Kysia Eliza, 2000. Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat (Sasi) di Maluku dalam Prosiding Konferensi

Nasional II Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. Makasar, Kerjasama Proyek Pesisir Jakarta-UNHAS,DELP,CRC-Univ.Rhode Island-Pemda Sulsel dan LSM Konsosium Kelautan Sulsel.

Rhormens MS, Pedrini ADG, Ghilardi-Lopes NP. 2017. Implementation feasibility of a marine ecotourism product on the reef environments of the marine protected areas of Tinhare and Boipeba Islands (Cairu, Bahia, Brazil). *Ocean & Coastal Management* 139: 1-11.

Ross,S and Wall,G.1999. Evaluating Ecotourisme: the Case of North Sulawesi, Indonesia. *Tourism Management*,Vol 20, pp.673 – 682.

Stronza And Gordillo, 2008. Community Views of Ecotourism. *Annals of Tourism Research*, Vol. 35, No. 2, Pp. 448–468, 2008

Sylivi.B and Hitesh Mehta, 2006. Ecotourism and Ecological Restoration.*Journal for Nature Conservation*. 14. 233 – 236.

Walters,R.D.M., Samways,M.J,2001. Sustainable dive ecotourism on a South African coral reef. *Biodiversity Conservation*,10 (12) 2167-2179

West, P., and J. Carrier 2004 Ecotourism and Authenticity: Getting Away from it All? *Current Anthropology* 45:483–491.

Zubayr,M., Darusman,D., Nugroho,B., dan Nurrohmat,D.R.,2014. Peranan Para Pihak Dalam Implementas Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan kehutanan* Vol.11 No 3,(12), 239-256.